



Kiai dan Komunikasi Politik Praktis di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok Buntet Pesantren Cirebon

Syarhabil Ali Fikri ^{1*}, Asep Saeful Muhtadi ², Bambang Saiful Ma'arif ³

¹ *Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 24-26, Tamansari, Kota Bandung, Indonesia*

² *UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH. Nasution No.105 Cibiru Kota Bandung, Indonesia*

³ *Fakultas Ilmu Dakwah Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1, Tamansari, Kota Bandung, Indonesia*

**syarhabil1996@gmail.com*

Received: 12 Juli 2024 ; Accepted: 24 Agustus 2024; Published: 27 Agustus 2024

DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jp.v8i2.297>

Abstrak

Komunikasi politik memainkan peran penting di hampir semua kelompok masyarakat, termasuk pesantren. Sebagai protagonis pesantren, kiai memainkan peran sentral dalam komunikasi politik pesantren. Kharisma Kiai menjadi incaran banyak politisi. Hal ini terjadi karena adanya simbiosis mutualisme yang mengarah kebudayaan pragmatis antara dunia pesantren dengan kepentingan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyampaian pesan politik oleh kiai dalam politik praktis, khususnya yang terjadi di pondok pesantren Buntet Cirebon. Keefektifan Kiai sebagai komunikator politik di pesantren dapat digambarkan dalam proses mobilisasi santri oleh kiai untuk memasuki dunia politik. Menggambarkan reaksi publik terhadap keterlibatannya dalam politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumen tunggal. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi one-step flow dan teori patron-klien. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan berbagai data yang tersedia di berbagai jurnal. Penelitian menunjukkan, kiai dengan statusnya sebagai patron politik berperan penting dalam proses politik. Kiai muncul sebagai elit pesantren yang diharapkan sikap politiknya setiap pemilu. Dalam praktiknya, kiai menggunakan mimbar atau pengajian sebagai sarana politik. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, tidak dapat dihindari bahwa kiai akan menggunakan berbagai produk teknologi informasi dalam berbagai cara dan pilihan. Kiai sebagai tokoh agama berperan sebagai agen sosialisasi politik, sehingga tidak dapat lepas dari kepentingan politik.

Kata kunci: Pesantren, komunikasi politik, kiai, kepentingan politik

Abstract

Political communication plays an important role in almost all community groups, including pesantren. As the protagonist of pesantren, kiai play a central role in pesantren political

communication. Kiai charisma is the target of many politicians. This happens because of the symbiotic mutualism that leads to a pragmatic culture between the pesantren world and political interests. This study aims to examine the process of delivering political messages by kiai in practical politics, especially those that occur in the Buntet Pesantren Cirebon. The effectiveness of Kiai as a political communicator in pesantren can be described in the process of mobilizing santri by kiai to enter the political world. Describing public reactions to his involvement in politics. This research uses a qualitative method with a single-instrument case study approach. This research uses one-step flow communication theory and patron-client theory. Data collection was done through observation, interviews, and various data available in various journals. The research shows that kiai with their status as political patrons play an important role in the political process. Kiai appear as pesantren elites whose political attitudes are expected every election. In practice, kiai use the pulpit or recitation as a political tool. With the development of current technology, it is inevitable that kiai will use various information technology products in various ways and choices. Kiai as religious figures act as agents of political socialization, so they cannot be separated from political interests.

Keywords: Pesantren, political communication, kiai, political interests

A. Pendahuluan

Sekarang ini komunikasi politik menjadi sangatlah penting dan memberikan pengaruh sangat besar disetiap negara baik yang berbentuk “otoriter” maupun yang berbentuk “liberal” (Evanne & Agus, 2021). Tsagarousianou memberikan pandangan bahwasanya, komunikasi politik menjadi bagian yang sangat penting dalam proses demokrasi (Hasfi, 2019). Pondok Buntet pesantren yang awalnya hanya menjadi lembaga pendidikan yang amat kental dengan kekhasan pada masyarakat kini banyak perubahan semenjak banyak dari para pengasuh pondok pesantren dan kiai terjun langsung dalam dunia politik. Di dalam kehidupan pesantren selain menerapkan segala ajaran Islam, juga memfokuskan pada moral yang bersifat keagamaan sebagai pedoman tutur kata dan perilaku (Sulaiman, 2019), pesantren sendiri bertujuan untuk membentuk dan menjadikan pribadi dari seorang mukmin yang taat dengan tujuan untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia baik secara jasmani maupun rohani (Indah, Isnaniah, & Rijal, 2018). Dapat dikatakan bahwasanya pondok pesantren yang melembaga dimasyarakat terutama dipedesaan, merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang cukup tua di Indonesia (Asiyah & Chasannudin, 2020). Awal mula berdirinya pondok pesantren yang memiliki sifat tradisional bertujuan untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan agama sebagai pegangan hidup (*tafaquh fi al-din*) dengan memfokuskan kajian tentang keutamaan dari moral dalam bermasyarakat (Ali, 2020), pesantren juga menjadi sebuah sistem pendidikan yang unik dan khas terutama di Jawa (Haningsih, 2008).

Kiai dan santri di Buntet pesantren bahkan dipesantren pada umumnya melakukan gaya komunikasi sangat unik yang dapat dilihat melalui proses kegiatan mengaji. Diluar dari kegiatan mengaji, kiai dan santri pun kerap melakukan komunikasi yang khas (Utami, 2018). Retorika menjadi gaya komunikasi dari seorang kiai dalam menyampaikan pesan-pesan kepada santrinya dengan tujuan tertentu. Dipesantren manapun terjadi pola komunikasi yang bervariasi dan di latar belakang tujuan dan motif dari kiai sehingga menimbulkan sebuah ciri khas tertentu (Ghaffar, Haryono, & Tallapessy, 2021). Pondok Buntet pesantren yang awalnya hanya menjadi lembaga pendidikan yang amat kental dengan kekhasan pada masyarakat kini banyak perubahan semenjak banyak dari para pengasuh pondok pesantren dan kiai terjun langsung dalam dunia politik.

Terjunnya kiai dalam dunia politik dan meraup sebanyak-banyaknya suara pemilu, pesantren dijadikan sebagai sasaran banyak partai politik. Akan tetapi, tidak semua kiai terlibat dalam dunia politik praktis, hal tersebut tergantung dari pola kepemimpinan kiai sebagai tokoh sentral pesantren (Shofiya & Yani, 2014). Hampir di seluruh jajaran partai politik, pasti ada sebuah figur kiai yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dunia politik kini tidak lagi menjadi hal yang tabu, bahkan “seakan-akan” telah menjelma menjadi sesuatu yang wajib untuk dicapai dan direbut. Kini kiai menemukan ladang yang cukup basah baru, yang dahulunya kiai lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus permasalahan pesantren dan masyarakat secara langsung, kini berubah profesi demi menggeluti dunia politik yang otomatis merubah daripada eksistensi dari kiai. Reorientasi kitab kuning yang berbahasa arab secara tidak langsung meng-hegemoni kekuatan politik kiai di Indonesia (Hanafi & Solihah, 2020).

Sekarang ini posisi kiai sangat diperlukan untuk membina masyarakat, terlebih lagi dizaman pragmatis sekarang ini. Budaya pragmatis dalam masyarakat sudah mendarah daging, sayangnya sikap pragmatis ini tidak hanya melekat pada masyarakat pada umumnya melainkan juga kebanyakan kiai mengidap penyakit ini. Buntet pesantren saat ini banyak sekali bermunculan pondok-pondok pesantren dengan latarbelakang kiai atau pengasuh pondok pesantren yang masih kurang memiliki kapabilitas di bidang ilmu agama dan mengurus pesantren. Mirisnya lagi kebanyakan dari mereka menjadikan pesantren sebagai barang dagangan untuk memenuhi segala kepentingan-kepentingan pribadi.

Kekuatan dan kelemahan politik berorientasi pesantren saat ini harus disikapi oleh Kiai sebagai juru kunci dan sebagai figur sentral yang bertanggung jawab dalam memajukan pesantren (Munawar, 2021). Namun, partisipasi pemilih dinegara kita dapat diraba dalam dua bentuk: partai politik (parpol) dan non-partai politik, sehingga partisipasi di non-parpol sangat tinggi, dengan jaringan sosial, sosial-keagamaan, dan jaringan agama yang melibatkan gender. memiliki dampak

yang besar. Mobilisasi politik hegemonik yang dilakukan oleh jaringan kekerabatan, jaringan etnis, perpecahan sosial, umat, ulama/kiai, atau Orde Baru (Haris & Dardun, 2021). Relasi yang terjalin merupakan pondasi penting untuk memastikan bahwa kepribadian, jaringan keagamaan, dan ulama/kiai memiliki peran yang cukup krusial dalam menumbuhkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (Nugroho, 2011).

Ulama yang merupakan sesosok panutan, figur moral, dan orang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang begitu sangat luas. Kehadiran sosok kiai atau ulama dalam panggung politik, banyak yang berharap dunia politik akan menjadi lebih bermoral, mendahulukan segala kepentingan yang dibutuhkan oleh rakyat serta menjunjung luhur nilai-nilai dari keadilan dan kemanusiaan (Fata, 2019). Seperti pendapat dari Al-Faruqi “seorang Ulama ialah simbol daripada sebuah etika dan moralitas politik, keikutsertaan ulama dalam ranah politik harus bisa memberikan kontribusi yang besar bagi terciptanya pondasi politik yang bermoral. Moral yang benar-benar hidup dan menjadikan landasan politik dan bukan hanya slogan politik” (Mahadi, 2015). Memang tidak ada alasan yang mendasar supaya para kiai atau ulama menghindari politik praktis, dikarenakan berpolitik menjadi sebagian dari tuntutan agama, oleh karena itu hampir di seluruh pelaksanaan pemilu sebagian besar kiai terlibat aktif dalam kegiatan kampanye dan melakukan pencitraan positif calon yang didukung dengan sebuah dalih untuk kemaslahatan umat (Mahadi, 2015).

Arus komunikasi satu arah menjadi metode yang sangat efektif yang dilakukan kiai kepada santri bahkan masyarakat sekitarnya (Hartono, 2016). Kegiatan ceramah menjadi sarana yang cocok untuk memberikan persepsi bisa juga mendoktrin setiap individu, kemudian memunculkan perilaku-perilaku untuk saling mempengaruhi (Sunarso, 2018). Kemampuan memanipulasi individu atau kelompok tokoh agama menjadi media yang tepat terutama kiai menjadi pilihan utama bagi para aktor politik (Nuraeni, 2021). Kiai merupakan sekelompok muslim yang memiliki pengaruh sangat luas dan besar dimasyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim baik secara pengetahuan tentang ilmu agama, memperjuangkan syariat Islam, perangai yang baik dan diteladani maupun karismaniknya sangat disegani oleh masyarakat (Sunarso, 2018). Peran dari kiai juga sangatlah dominan dalam mengontrol situasi sosial yang terjadi dalam masyarakat pada era yang kian modern dan demokratis sekarang ini (Hasbullah & Rahman, 2018). Kepemimpinannya juga dapat di ibaratkan sebagai *informal leadership*, karena kiai mendapat pengakuan masyarakat akan kemampuannya menjadi seorang pemimpin.

Kiai dan pesantren memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai rujukan pemikiran keagamaan, menjadikan kiai dan pesantren digambarkan bagaikan sebuah miniatur kerajaan dan raja kecil

(Hannan & Syarif, 2020). Kedekatan kiai dengan politik memunculkan sebuah dinamika yang cukup menarik dan kontroversi jika kita memotretnya di era pasca-kemerdekaan (Arravi, 2021). Kiai memiliki kekuatan yang berhasil menjadi penyeimbang dan memadai atas gempuran para komunisme, akantetapi eksistensinya juga diakui dengan terbentuknya kementerian penghubung pesantren dan ulama (Khoiruddin, 2018), dalam sejarah tercatat kontribusi besar kiai pesantren, khususnya ketika membungkam pengaruh dari kekuatan politik komunisme yang bergerak *sporadic* pada akhir dari kekuasaan Bung Karno (Muhaimin & Wahab, 2019). Sangat disayangkan pada pemerintahan Soeharto yang secara sistematis memarginalisasi kiai dan pondok pesantren (Harun, 2018).

Sekarang ini posisi kiai sangat diperlukan untuk membina masyarakat, terlebih lagi dizaman pragmatis sekarang ini. Budaya pragmatis dalam masyarakat sudah mendarah daging, sayangnya sikap pragmatis ini tidak hanya melekat pada masyarakat pada umumnya melainkan juga kebanyakan kiai mengidap penyakit ini. Buntet pesantren saat ini banyak sekali bermunculan pondok-pondok pesantren dengan latarbelakang kiai atau pengasuh pondok pesantren yang masih kurang memiliki kapabilitas di bidang ilmu agama dan mengurus pesantren. Mirisnya lagi kebanyakan dari mereka menjadikan pesantren sebagai barang dagangan untuk memenuhi segala kepentingan-kepentingan pribadi.

Kepentingan tersebut bisa berwujud kepentingan secara politis, juga bisa berwujud bantuan-bantuan materi dari pemerintah. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari pesantren kiai di Buntet pesantren memberikan pandangan politiknya kepada para santri sehingga dari komunikasi satu arah ini santri akan terpengaruh oleh pandangan-pandangan politik yang diberikan oleh kiai. Hasil dari komunikasi tersebut akan menjadi sebuah ladang basah yang sangat ideal untuk para aktor politik di masa pemilihan umum. Kiai menjadi penggerak lumbung suara pada masa pemilu, karena hubungan yang dijalin oleh kiai tidak hanya antara kiai dengan aktor politik saja, bahkan akan menjadi sangat luas kepada kerabat dari kiai, santri, wali santri, alumni pesantren, dan masyarakat sekitar yang memiliki pendapat bahwasanya seorang kiai akan selalu menjadi seorang panutan dalam segala hal dan aspek kehidupan tidak terkecuali dalam proses menentukan sebuah sikap politik.

Pada akhirnya, ketika Kiai terlibat dalam politik yang sebenarnya, istilah kiai politik muncul. Artinya, publik secara mandiri mengapresiasi penampilan kiai beserta segala keputusannya, atau mengesampingkan antara kiai yang berkecimpung politik dan kiai yang tidak menyentuh politik. Disadari atau tidak, keterlibatan politik kiai mengurangi kharisma kiai di mata para jamaahnya. Keterlibatan Pesantren dalam politik, di satu sisi, mempengaruhi keberadaan Pesantren dan, di sisi

lain, kekuatan politik yang didukung oleh pesantren memberikan dampak buruk untuk pesantren.

Terjunnya kiai dalam dunia politik dan meraup sebanyak-banyaknya suara pemilu, pesantren dijadikan sebagai sasaran banyak partai politik. Akan tetapi, tidak semua kiai terlibat dalam dunia politik praktis, hal tersebut tergantung dari pola kepemimpinan kiai sebagai tokoh sentral pesantren (Shofiya & Yani, 2014). Hampir di seluruh jajaran partai politik, pasti ada sebuah figur kiai yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dunia politik kini tidak lagi menjadi hal yang tabu, bahkan “seakan-akan” telah menjelma menjadi sesuatu yang wajib untuk dicapai dan direbut. Kini kiai menemukan ladang yang cukup basah baru, yang dahulunya kiai lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus permasalahan pesantren dan masyarakat secara langsung, kini Kiai berubah profesi demi menggeluti dunia politik yang otomatis merubah daripada eksistensi dari kiai. Reorientasi kitab kuning yang berbahasa arab secara tidak langsung meng-hegemoni kekuatan politik kiai di Indonesia (Hanafi & Solihah, 2020).

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan peneliti. Dalam bukunya Robert K. Yin menjelaskan bahwasanya sebuah kasus diumpamakan sebuah fenomena kontemporer pada dunia nyata, ketika adanya batasan diantara sebuah konteks yang ada dengan fenomena. Robert K. Yin juga menerangkan mengenai definisi dari studi kasus, yakni sebuah inkuiri atau bisa disebut juga dengan penyelidikan empiris yang menelaah sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan nyata, dimana batasan dari fenomena dan konteks tidak dapat dilihat dengan tegas, dengan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian “bagaimana” atau “mengapa” mengenai sebuah fenomen yang menarik (Yin R. k., 2014). dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan penelitian studi kasus tunggal (*single instrumental case study*) adalah sebuah riset studi kasus yang dijalani dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan sebuah suatu isu atau perhatian.

Penelitian ini memakai metodologi penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang sangat tepat bila pertanyaan utamanya adalah studi dengan komponen *how, why*, atau *how, why*. Studi kasus dapat pakai oleh peneliti untuk mengontrol kejadian yang diteliti. Tahapan pengorganisasian dan penyusunan data penelitian, kejadian yang terjadi dalam pengalaman pribadi (Yin R. K., 2016). Berdasarkan penjabaran pada pendahuluan di atas, maka penelitian ini terfokus pada: “Bagaimana Komunikasi Politik Praktis Kiai di Pondok Buntet Pesantren Cirebon?”.

Lokasi pada penelitian ini berada pada pesantren-pesantren dibawah naungan Yayasan

Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen utama peneliti bertindak sebagai pengamat, pewawancara, pengumpul data sekaligus sebagai pembuat laporan hasil penelitian oleh karena itu, instrument dalam penelitian ini menggunakan pedoman observasi, wawancara serta dokumentasi. Subjek penelitian pada penelitian ini peneliti memilih Kiai Adib Rofi'uddin karena beliau memiliki kapabilitas dan pengalaman yang sangat memadai yang dapat dilihat dari pengalaman beliau yang pernah menjabat menjadi Rois Syuriah PBNU, Wakil Khatib Syuriah PBNU, Wakil Dewan Syuro NU Kabupaten Cirebon dan Menjadi Sesepeuh di Buntet Pesantren (pimpinan Buntet Pesantren Cirebon dari tahun 2000 sampai sekarang). Peneliti juga memilih Kiai Aris Ni'matullah karena kapabilitas dan pengalaman beliau yang pernah menjadi pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pengurus dewan masyarakat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian beliau sekarang menjadi Khatib Dewan Sepuh Buntet Pesantren.

Peneliti memakai metode studi kasus tunggal karena penelitiannya memfokuskan tentang komunikasi politik praktis kiai di Buntet Pesantren. Studi kasus instrumen tunggal (*single instrumental case study*) adalah studi kasus yang terfokus pada suatu isu atau pusat perhatian saja. Untuk mengilustrasikan isu tersebut, hanya digunakan satu kasus yang terbatas.

Analisi data yang dilakukan peneliti setelah memperoleh data dilapangan dengan tahapan editing, *classifying*, *analyzing*, dan *concluding*. Setelah peneliti menganalisis data yang diperoleh peneliti memeriksa keabsahan dari data yang peroleh dengan mengecek kredibilitas dari data yang diperoleh, *transferability* data, *dependability* data, dan *konfirmabilitas* data yang diperoleh sehingga penelitian ini menjadi tepat dan akurat.

C. Pembahasan

1. “Bermain” Politik di Tengah Perubahan

Dalam sejarahnya Buntet pesantren memiliki pengalaman politik yang cukup panjang yang besar terkait dengannya, yang mempengaruhi kedewasaan dan kehebatannya dalam menanggapi berbagai macam jenis perubahan kacamata politik multipartai negara. Bagi Buntet pesantren, politik bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi suatu yang “biasa saja”. “Hal yang tak bisa dilaksanakan orang lain adalah orang lain terlalu mensakralkan politik. Di Buntet pesantren sendiri hari ini saya PDI besok Golkar tidak menjadi masalah” menurut beliau kiai Aris Ni'matullah yang akrab disapa Abah Imat.

Dalam sejarahnya Buntet pesantren memiliki pengalaman politik yang cukup panjang yang

besar terkait dengannya, yang mempengaruhi kedewasaan dan kehebatannya dalam menanggapi berbagai macam jenis perubahan kacamata politik multipartai negara. Bagi Buntet pesantren, politik bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi suatu yang “biasa saja”. “Hal yang tak bisa dilaksanakan orang lain adalah orang lain terlalu mensakralkan politik. Di Buntet pesantren sendiri hari ini saya PDI besok Golkar tidak menjadi masalah” menurut beliau kiai Aris Ni'matullah yang akrab disapa Abah Imat.

Menurutnya politik juga harus dapat dikendalikan dan dimanfaatkan, dan tidak sebaliknya, pesantren yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik para politisi. “Daripada mereka (politisi) memanfaatkan kita, membuat pusing kita, lebih baik kita memanfaatkan mereka, dan memusingkan mereka. Dripada dibingungkan dan dimanfaatkan oleh partai, lebih baik membingungkan dan memanfaatkan partai untuk kemashlahatan umat”.

Sikap santai dalam politik ini merupakan bentuk ijtihad politik Buntet pesantren ketika iklim politik saat ini sedang kacau dengan kepentingan para politisi. Bagi Buntet pesantren, seluruh partai politik yang ada adalah sama dan memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, sangat naif jika Buntet pesantren hanya condong pada satu pihak saja. Keuntungan dari posisi politik seperti itu sebagaimana yang disampaikan oleh abah Imat “...sekarang Buntet pesantren bukan lagi pesantren politik yang sudah terkapling-kapling oleh warna bendera partai, Buntet sekarang merupakan pesantren yang netral, sesuai dengan *khittah*. Inilah sikap yang benar ketika pesantren terjun dalam politik, hal inilah yang diinginkan oleh NU. Pesantren itu harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai, dan semua *stake holder* politik”.

Menurut pendapat Abah Imat, kiai yang lain menunjuk pada sesuatu yang lebih umum, yaitu pentingnya melindungi umat Islam area Jawa Barat dari upaya politik non-pesantren yang dirancang untuk melemahkan pesantren melalui pesantren lain di Cirebon dengan kasus yang seperti ini. Misalnya, dapat dikatakan bahwa upaya merebut pengaruh pesantren digunakan untuk melemahkan ideologi *Ahlussunnah wal Jama'ah* untuk tujuan yang tidak mendukung masa depan pesantren yang berlandaskan Nahdlatul Ulama.

2. Kiai yang Dituntut Untuk Pragmatis

Penentuan sikap “netral” menurut Abah Imat adalah Langkah-langkah yang dilakukan oleh Buntet pesantren secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pandangan politik masyarakat. Secara umum, masyarakat melihat sikap ini sebagai sikap yang harus dilakukan Buntet Pesantren. “Saya tidak sepakat pesantren (Buntet) terlibat politik. Pesantren itu lembaga pendidikan yang netral, orientasinya itu pengembangan pendidikan, soal kemudian secara personal kiai memiliki hak untuk memilih kelompok atau partai atau kelompok tertentu itu soal

lain”.

Kedatangan para pejabat dan tokoh politik ke Buntet Pesantren menurut Abah Imat “...Karena Ulama seharusnya tidak mendekati politisi atau pemerintah, sebaliknya pemerintah harus menemui kiai”. Jika pertukaran pandangan dan belajar tentang politik antara pemerintah dan ulama menjadi acara sehari-hari akan menjadi sangat menarik untuk dikaji.

Politik hanya diartikan sebagai upaya atau cara untuk memperoleh kepentingan sementara dan bersifat abstrak. Politik menjadi masalah jika “hanya” sekedar menggunakan dan bermain saja. Siapa yang bisa bermain dengan baik dan siapa yang bisa menggunakannya.

Pendidikan politik sangatlah mahal sekarang ini. Belum lagi berita TV tentang hukum, ketertiban, politik dan korupsi. Karena itu, kelompok akar rumput ini menjadi semakin acuh tak acuh. Akhir dari ketidakpedulian ini adalah pikiran bertukar “suara” ketika “dibutuhkan”.

Dalam pengambilan keputusan dan pengambilan sikap dari seseorang dapat kita lihat dari *background* yang dia miliki. *Background* atau latar belakang seseorang akan selalu dijadikan pertimbangan atau patokan untuk menilai orang tersebut baik atau buruk. Dalam pencalonan kepemimpinan contohnya, latar belakang seharusnya menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan landasan dalam memilih calon yang akan memimpin kita.

Pada zaman modern sekarang Buntet pesantren dituntut untuk mengikuti perkembangan politik Nasional dengan tertatih-tatih oleh godaan dari sikap pragmatis yang sudah menjadi wabah di Indonesia sekarang ini. Mei lalu peneliti dengan narasumber berbincang-bincang panjang lebar, beliau adalah kiai Adib selaku sesepuh dari Buntet pesantren itu sendiri. Tuntutan untuk menjadi pragmatis itu bermula pada tahun 2000 silam, waktu itu Buntet membutuhkan dana untuk pembangunan sekolah kurang lebih membutuhkan 24 lokal dikarenakan kondisi sekolah yang semakin tidak kondusif, yang kalau dinominalkan mencapai kurang lebih 1 Milyar rupiah.

Karena kurangnya dana yang dimiliki oleh Buuntet, pembangunan 24 lokal untuk sekolah di Buntet menjadi mangkrak selama kurang lebih 3 tahun. Pada tahun 2004 silam Buntet pesantren kedatangan tamu Capres dan Cawapres untuk menjalin hubungan politik yang diawali oleh bapak Taufik Kemas, waktu itu Megawati dan Hasyim Muzadi mencalonkan diri menjadi bakal Capres dan Cawapres kala itu. Pertemuan antara perwakilan Buntet dengan Taufik Kemas dilakukan secara intens di Jakarta tepatnya di pendopo Dedi Supardi (mantan Bupati Cirebon dari fraksi PDIP). Pertemuan tersebut membuahkan hasil dibangunnya sebuah lokal untuk sekolah yang awalnya dibutuhkan hanya 24 lokal menjadi 32 lokal.

Perjanjian pada waktu itu Buntet hanya ingin terima kunci saja, tidak mau mengurus prihal dana. Selama proses pembangunan tersebut, banyak sekali terjadi kontra dikalangan para kiai di

Buntet dari hasil pengambilan keputusan yang diambil oleh kiai Adib waktu itu dengan melakukan perjanjian dengan PDI-P. Suasana memanas ketika rapat di gedung YLPI (nama Yayasan yang ada di Buntet pesantren), suasana tersebut dipicu oleh beberapa kiai yang dengan vokal menolak bantuan pembuatan lokal untuk sekolah tersebut yang dananya berasal dari PDIP. Kemudian dengan bijaknya kiai Adib menyampaikan argumennya“ kalau sampean semua ingin pembangunan ini dihentikan, manga kalian semua harus patungan untuk melanjutkan pembangunan tersebut”. Seketika suasan hening, kemudian satu persatu kiai mulai menyetujui kerjasama dengan PDIP tersebut dengan alasan “untuk kemaslahatan ummat”.

Kiai Adib juga memberikan sebuah *maqolah* yang bagus dari Imam Junaidi Al-Baghdadi:

لَا تَطْلُبْ طَعْمًا (رِزْقًا) بِغَيْرِ سَبْهَةٍ يَبْقَى جَوْعًا

Artinya: “ Jangan sekali-kali kalian mencari makan (rizki) tanpa subhat, karena kalau kalian mencari makan (rizki) tanpa subhat maka kalian akan mati kelaparan”.

Argument dari kiai Adib sendiri menurut peneliti sangatlah rasional di zaman dimana pragmatis sudah mendarah daging di negeri kita ini. Terlebih lagi tuntutan pembangunan pesantren yang membutuhkan dana yang sangatlah banyak yang tidak bisa di selesaikan dengan kantong pribadi dari para kiai. Dalam memahami dari motif perpolitikan kiai memang sangatlah tidak mudah. Posisi kiai sebagai elit agama selalu memiliki pertimbangan yang sangat matang dalam memberikan tindakan dan keputusan yang dilihat dari berbagai aspek. Terkadang hasil pertimbangan tersebut cenderung bersifat dogmatis bahkan pragmatis.



Gambar 1. Para Kiai melakukan pertemuan dengan Megawati dan Taufik Kemas

Tidak sedikit kiai di Buntet sendiri membawa majelis-majelisnya kedalam ranah politik demi kepentingan pribadinya. Jika kita melihat kontestasi pemilihan umum yang dimana para politisi berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak agar menjadi pemenang, untuk dapat bersaing dalam arena tersebut para politikus harus memiliki sumberdaya yang nantinya dijadikan senjata pada arena perpolitikan tersebut. Jika kita melihat pada sebuah fakta sosial yang ada pada diri masyarakat dimana posisi kiai sebagai sosok yang harus untuk dihormati setelah kedua orang tua yang dimana loyalitas dari jamaah dan santrinya jika kita memandang pada perspektif komunikasi dianggap sebagai hubungan patron-klien.

Beliau kiai Adib sendiri memegang teguh prinsip politik “keummatan”, apa itu politik “keummatan”, yakni sebuah konsep politik yang diambil demi kemaslahatan ummat, ketika ada bantuan-bantuan yang datang entah itu berupa dana maupun infrastruktur dan bantuan tersebut dapat menjadi maslahat bagi ummat maka beliau kiai Adib akan mengambilnya, walaupun konsekuensinya sangat besar jika dilihat dari sejarah yang sudah terjadi, sepertihalnya bantuan lokal yang diberikan PDIP silam yang banyak sekali kecamatan-kecamatan yang didapatkan oleh kiai Adib, sepertihalnya cemoohan dan nyinyiran yang dilontarkan oleh kiai-kiai lain seperti “buka saja dadanya, didada kiai Adib ada moncong putihnya” akantetapi sekarang ini ketika bangunan sekolah itu sudah berdiri banyak sekali anak dari orang-orang yang mencemooh dan memberika nyinyiran bersekolah di situ, dengan bijak kiai Adib memberikan argumen “tidak apa-apa, anak itu tidak berhak untuk menanggung dosa dari para orangtuanya, kita harus menyelamatkan mereka karena merekalah yang akan memimpin Buntet kedepannya”.

3. Keefktifan Kiai Menjadi Komunikator Politik

Kiai menjadi komunikator politik memegang peranan penting dalam masyarakat, tertama dalam proses pembentukan opini publik. Ada teori opini publik yang sepenuhnya berpusat di sekitar komunkator poltik, yatu teori opini publik yang berpengaruh. Kiai memiliki faktor yang menjadi penunjang untuk menjadi seorang komunikator politik dan sangat efektif. Hal yang paling utama dari semua faktor yang dimiliki kiai menjadi efektif ketika menjadi seorang komunikator politik adalah kredibilitas dari kiai itu sendiri, kredibilitas kiai itu sendiri adalah seorang yang memiliki kekuatan secara social dan budaya dalam masyarakat. Selain kiai memiliki kekuatan secara sosial dan budaya, kiai sendiri menjadi tolak ukur dari santri-santrinya bahkan banyak dari santri, masyarakat dan alumni menjadikan kiai sebagai landasan untuk pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Keefektifan kiai dalam menjadi komunikator politik dapat dilihat dari nilai-nilai yang dianut oleh pondok pesantren yang mengarah kepada terbentknya hubungan *ptron-client* antra kiai dengan

santri, ada tiga hal yang mendasar terbentuknya patron-klien di Buntet pesantren sendiri. *Pertama*, patron-klien di pondok pesantren berdasarkan pada pertukaran yang sangat tidak seimbang pada perbedaan status yang dimiliki oleh kiai dan santri. Santri yang diposisikan sebagai seorang klien menerima banyak sekali jasa dari patron yakni kiai sehingga klien selalu terikat dan bergantung dengan patron. *Kedua*, hubungan patron-klien antara kiai dengan santri bersifat personal. Resiprioritas menjadi pola yang bersifat personal antara kiai dengan santri yang menciptakan rasa kepercayaan dan bergantung dalam mekanisme hubungan tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari cara penghormatan santri kepada kiai yang bersifat kultus individu. *Ketiga*, hubungan tersebut tersebar secara menyeluruh kepada santrinya, bersifat fleksibel dan tidak memiliki waktu. Hal tersebut memiliki kemungkinan karena sosialisasi nilai itu terjadi ketika menjadi santri selama bertahun-tahun dan sudah mendarah daging. Sesuatu nilai yang sangat mencolok yang selalu dipegang oleh santrinya adalah santri tidak memiliki keberanian untuk melakukan perdebatan apapun dengan kiainya atau sampai membantahnya karena santri memiliki rasa ketakutan akan ilmunya tidak manfaat atau juga kualat.

4. Dualisme Terhadap Keterliban Kiai dalam Politik

Kalah dan menang, atau menjadi calon dan tidak disetujui, akan berdampak negatif bagi Buntet pesantren dan kiai. Jika menang, orang akan bertanya-tanya berapa banyak kiai dibayar untuk memenangkannya. Jika kalah, kiai akan kehilangan suara dan banyak orang tidak akan mengikutinya lagi, dan sangat mengurangi kepercayaan orang. Masalah diperburuk ketika seorang kandidat yang gigih menang, tetapi ketika dia menjabat, dia terbukti tidak dapat dipercaya, tidak bertanggung jawab, korup, dan menyalahgunakan kekuasaan. Sikap netral dan “menyambut” terhadap segala kepentingan politik yang secara sadar atau tidak sadar ditunjukkan oleh Buntet pesantren meningkatkan kesadaran, kedewasaan dan kecerdasan politik masyarakat sekitar pesantren, khususnya para alumni dan wali santri. Sebetulnya masyarakat Buntet sudah terbiasa dengan “tamun politik” yang datang ke Buntet pesantren dengan berbagai latar belakang politik dan ideologi, bahkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, seperti acara besar Buntet pesantren yakni “Haul Sespup dan Warga Buntet” yang telah menjadi tradisi tahunan, dengan pejabat dan politisi dari latar belakang politik yang berbeda-beda baik di tingkat lokal maupun nasional. Para tamu undangan, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren tidak menjadi “tidak nyaman” pada saat kedatangan mereka. Keberadaan mereka dianggap “biasa” dan tidak membenarkan mendukung kepentingan politik di acara besar Buntet pesantren. Masyarakat menyadari bahwa sosok yang hadir dalam acara tersebut tidak ada hubungannya dengan pencalonan, dan kedatangan mereka tidak serta merta diberi restu dan dukungan dari Buntet pesantren bagi mereka. Menurut kiai Adib

“...kalau haul Buntet pesantren kan intinya itu silaturrohim. Artinya ketika berbicara silaturrohim, maka tidak ada ikatan siapapun yang harus atau tidak boleh datang kesitu. dan sah-sah saja untuk siapa saja yang mau datang, entah nanti di dilamnya ada maksud-maksud tertentu, wallahu a'lam”.

Kedatangan para pejabat dan tokoh politik ke Buntet Pesantren menurut Abah Imat “...Karena Ulama seharusnya tidak mendekati politisi atau pemerintah, sebaliknya pemerintah harus menemui kiai”. Jika pertukaran pandangan dan belajar tentang politik antara pemerintah dan ulama menjadi acara sehari-hari akan menjadi sangat menarik untuk dikaji.

Kedatangan mereka bagaikan prestis karena Buntet pesantren telah mendapat perhatian lebih dari mereka, dan dianggap sebagai berkah dan kesempatan untuk kemajuan Buntet pesantren itu sendiri. Menurut abah Imat “...saya kira haul itu menjadi bagian momen yang memang harus dimanfaatkan oleh pesantren (Buntet) sebagai momen penting untuk menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Kedatangan para tokoh itu saya kira dapat dimanfaatkan untuk kontribusi perkembangan di Buntet, soal dari mana partainya atau dari tokoh mana dan sebagainya bagi saya itu tidak masalah, yang penting orientasi mereka ketika mereka hadir di Buntet adalah bagai mana mereka bisa memberikan kontribusi yang positif dan nyata terhadap perkembangan pesantren di Buntet”.

Hal penting yang perlu diperhatikan tentang keberadaan pejabat dan politisi ke pesantren, adalah tentang pengungkapan “kepentingan politik” para politisi tersebut, seperti mendukung kampanye dan demonstrasi. Menurut abah Imat “...ya tidak apa-apa. Toh beliau juga datang kesini (Buntet Pesantren) cuma silaturahmi. Selagi dia tidak menekan untuk mendukungnya. Kunjungannya itu tidak dalam tujuan kampanye, artinya sambutan-sambutan, dukung-mendukung dan lain-lain. Kalau dia hadir, datang, terus mengikuti acara silaturahmi ke pesantren, apalagi membantu pesantren, ya kita setuju-setuju saja”. Bertolak belakang dengan pendapat kiai lain “...kalau acara resmi tahunan pesantren (haul Buntet) digunakan kampanye, sangat tidak setuju, seolah-olah mereka mengambil kesempatan dalam kesempatan. Sebenarnya warga dan santri pun bisa menilai, apakah ini kampanye atau tidak. Sebaiknya diperbanyak tausyah-tausiyah saja”. menurut abah Imat “kita hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari kepentingan dan keputusan politik, kita setuju dengan kehadiran mereka itu juga sebuah keputusan politik, penolakan mereka terhadap kedatangan para politisi pun itu termasuk sikap politik, ketika kita hidup di Indonesia sendiri pun adalah hasil dari berpolitik”.

D. Simpulan

Pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan agama (*tafaqqahu fiddin*) dan lembaga sosial (dakwah). Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ilmu

agama dan kesusilaan kurang ditekankan oleh para politisi, kecuali para pemerhati pendidikan, namun sebagai lembaga mahar yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, pesantren sangat dijunjung tinggi oleh para politisi karena pondok pesantren memiliki pengaruh dalam masyarakat yang menjadi target utama dari para politisi.

Keterlibatan pesantren di ranah politik yang semakin marak akhir-akhir ini secara nyata telah menimbulkan berbagai dampak cukup signifikan. *Pertama*; keterlibatan pesantren dalam politik secara nyata telah mendeligitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan. Banyak pesantren mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantren lebih sibuk berpolitik. Kondisi itu membuat masyarakat memandang pesantren tidak lagi objektif dalam sikap-sikap politiknya, karena cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu sehingga terjadi delegitimasi peran pesantren.

Kedua; pesantren telah turut mengukuhkan politik pragmatis karena pesantren telah menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik dengan kompensasi-kompensasi materi yang diterima suatu kondisi yang semakin menjauhkan pesantren dari masyarakat. Setidaknya hal itu semakin terasa belakangan ini, ketika masyarakat mulai menyoroti sikap politik pesantren yang dianggap hanya merusak independensi pesantren dan memecah umat ke dalam politik partisan.

Ketiga; terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren. Hal tersebut secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-akan membangkang terhadap pilihan politik pesantren. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin bisa membedakan antara sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati, dan diteladani serta sikap pesantren yang sebetulnya murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak harus ditaati.

Dijadikannya kiai sebagai komunikator politik dan pesantren menjadi media dalam berpolitik memberikan dampak yang sangat luarbiasa. Dalam perpolitikan yang terjadi di Buntet Pesantren sendiri lebih cenderung menganut sistem politik keUmmatan yang dalam pandangan politik tersebut lebih cenderung kearah pragmatis oportunis. Politik keUmmatan sendiri ialah dimana keputusan politik yang diambil dapat menguntungkan ummat maka Buntet Pesantren akan berada pada sisi tersebut, keuntungan yang dimaksud disini yakni mengenai pembangunan infrastruktur sekolah atau sarana dan prasarana umum yang dapat dinikmati oleh semua orang walaupun itu cenderung kearah pragmatis.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2020). PESANTREN PENDIDIKAN PRIORITAS: Upaya Mencegah Radialisme Melalui Pendidikan Multukultural di Pesantren. *TRANSFORMASI: Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 1-8.
- Arravi, M. A. (2021, Juni). PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH SANTRI DI WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (NU) LASEM KABUPATEN REMBANG DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 311-327.
- Asiyah, S., & Chasannudin, A. (2020). Pondok Pesantren dan Dakwah Politik: Kajian Historis Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 27-39.
- Evanne, L., & Agus, S. (2021, Februari). BUDAYA KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Balayudha*, 1(2), 33-40.
- Fata, M. K. (2019, November). MEMBACA POLARISASI SANTRI DALAM KONTESTASI PILPRES 2019. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 18(2), 325-346.
- Ghaffar, A. A., Haryono, A., & Tallapessy, A. (2021, April). POLA KOMUNIKASI KYAI DAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN AT-TAUFIQ WRINGIN BONDOWOSO. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 4(2), 594-610.
- Hanafi, W., & Sholihah, R. A. (2020, April). POLITIK BAHASA ASING DAN HEGEMONI PESANTREN DI NUSANTARA. *APHORISME: Journal of Arabic Language, Literature, and Education*, 1, 43-53.
- Hanafi, W., & Solihah, R. A. (2020, April). POLITIK BAHASA ASING DAN HEGEMONI PESANTREN DI NUSANTARA. *APHORISME: Journal of Arabic Language, Literature, And Education*, 1(1), 43-53.
- Haningsih, S. (2008). Peran Strategis Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam di Indonesia. *eL-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 27-39.
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2020, Juni). Agama dan Politik Konstelasi Pemikiran antara Kelompok Kultural dan Struktural pada Kalangan Kiai Pesantren Madura. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(1), 47-74. doi:DOI: <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1174>
- Haris, A., & Dardun, A. (2021, Januari-Juni). KIAI NU DAN POLITIK (KETERLIBATAN KIAI NU JEMBER DALAM KONTESTASI PILPRES 2019). *Fenomena: Jurnal of the Social Sciences*, 20(1), 91-114. doi:DOI: 10.35719/fenomena.v20i1.5
- Hartono, R. (2016, Januari-Juni). Pola Komunikasi di Pesantren: Studi tentang Model Komunikasi antara Kyai, Ustadz, dan Santri di Pondok Pesantren TMI AL-Amien Prenduan. *Al-Balagh*, 1(1), 67-100.
- Harun, I. (2018, Januari-April). PONDOK PESANTREN MODERN: POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DAN PROBLEMATIKA IDENTITAS MUSLIM. *Jurnal As-Salam*, 2(1), 53-60.
- Hasbullah, M., & Rahman, M. T. (2018, Januari). ELIT POLITIK ISLAM NASIONAL DAN PENGEMBANGAN PESANTREN DI DAERAH. *SOCIO POLITICA: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 8(1), 45-56.

- Hasfi, N. (2019, April). KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL. *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93-111.
- Indah, A. N., Isnaniah, & Rijal, M. K. (2018, Maret). TANTANGAN DAN SOLUSI BAGI MADRASAH DAN PESANTREN DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran*, 5(1), 29-35.
- Khoiruddin, U. (2018, November). Urgensi Peran Elit Agama dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis di Kabupaten Kediri). *PROSIDING NASIONAL*, 1(1), 131-154.
- Mahadi, U. (2015, Agustus). Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu. *Jurnal ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, 9(2), 229-252.
- Muhaimin, & Wahab, A. (2019, Desember). Santri, Misi Politik dan Perumusan Kebijakan Publik di Kabupaten Jember. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 157-182.
- Munawar, Z. (2021, Maret). Tanah, Otoritas Politik, dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam. *DIAKRONIKA*, 21(1), 1-12. doi:10.24036/diakronika/vol21-iss1/163
- Nugroho, K. (2011, Juni). Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral. *JPI: Jurnal Politik Indonesia*, 24(3), 202-214.
- Nuraeni. (2021, Januari). Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1-14.
- Shofiya, A., & Yani, M. T. (2014, Mei). Orientasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013. *KMKN: Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(2), 611-624.
- Sugiyono. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. In Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D (Vol. 25, p. 101)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, R. (2019, Juli). HAKIKAT PENDIDIKAN PESANTREN: Studi atas Falsafah, Idealisme dan Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja Mendobarat Bangka. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 1-29.
- Sunarso, N. (2018, Desember). PERAN KYAI DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI PEMILIH. *JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 169-175.
- Utami, N. W. (2018, April). Komunikasi Intrapersonal Kyai dan Santri dalam Pesantren Modern di Tasik Malaya, Sebuah Pendekatan Interactional View. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 141-152.
- Yin, R. k. (2014). *Studi Kasus & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research From Start to Finish (2nd ed.)*. New York: The Guildford Press.